

PENGELOLAAN SANITASI LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA SERANG

Anita Widiastuti, email : anitasstp14@gmail.com
**Analisis Kebijakan Muda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Banten**

Abstract

One of the Sustainable Development Goals (TPB) Agenda is to ensure the availability and management of clean water and sustainable sanitation. The city of Serang as the provincial capital has an important role in the development of Banten Province, so that the regional spatial development policy must be able to prioritize the quality of environmental sanitation.

This research uses descriptive qualitative research methods. The results of this study indicate that by considering weaknesses, strengths, opportunities and threats, the most appropriate environmental sanitation development policy in Serang City is to optimize the strengths to overcome external problems in Serang City. Recommendations submitted for the development of environmental sanitation are to improve the quality of sanitation facilities and infrastructure, increase the promotion of hygiene and health and improve the quality of health services.

Keywords: *Sanitation, Regional Development, Public Policy*

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan suatu daerah harus secara komprehensif mengakomodir permasalahan dari berbagai aspek kehidupan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa tata cara perencanaan pembangunan daerah prosesnya menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis dan top down bottom up. Adapun substansinya dalam perencanaan pembangunan daerah seharusnya berorientasi secara tematik, holistik, integratif dan spasial. Dengan mengikuti tata cara tersebut maka diharapkan seluruh stakeholder akan terlibat aktif dalam mencari solusi dari masalah pembangunan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mengamanatkan dalam setiap penyusunan program dan kegiatan dapat melibatkan seluruh pihak-pihak yang terkait. Sehubungan dengan hal tersebut, pada setiap proses perencanaan pembangunan akan terkait antara satu permasalahan dengan permasalahan lainnya. Oleh sebab itu, dalam menemukan solusinya tidak bisa berdiri masing-masing satu sama lain. Namun harus dikaji dari berbagai aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungannya.

Sanitasi yang memadai merupakan dasar dari pembangunan. Namun, fasilitas sanitasi jauh di bawah kebutuhan penduduk yang terus meningkat jumlahnya. Akibatnya, muncul berbagai jenis penyakit yang salah satu diantaranya adalah penyakit diare. Berdasarkan data WHO Tahun 2016, di dunia penyakit tersebut telah menimbulkan kematian sekitar 2,2 juta anak per tahun dan menghabiskan banyak dana untuk mengatasinya. Minimnya sanitasi lingkungan seperti penanganan sampah, air limbah, tinja, saluran pembuangan, dan kesehatan masyarakat, telah menyebabkan terus tingginya kematian bayi dan anak oleh penyakit diare dan berperan penting dalam mengundang munculnya berbagai vektor pembawa penyakit.

Seperti halnya masalah sanitasi lingkungan, yang menjadi sumber masalahnya terdiri dari berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu, menyelesaikan permasalahan sanitasi lingkungan tidak bisa diambil dari satu sudut pandang saja namun harus menyentuh seluruh sektor-sektor yang terkait. Dalam agenda SDGs yang terdiri dari 17 tujuan, sanitasi masuk dalam tujuan ke 6, yaitu air bersih dan sanitasi layak. Dalam goals 6 ini menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2017, di Indonesia presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak adalah 72,04 %. Hal ini menunjukkan masih ada 30 %, penduduk Indonesia yang belum mempunyai akses sumber air minum yang layak dikonsumsi.

Kota Serang sebagai ibukota provinsi, menjadi salah satu poros pembangunan wilayah di Provinsi Banten. Untuk mendukung hal tersebut, tuntutan kebutuhan lahan sebagai ruang kegiatan yang ada di ibukota provinsi menjadi sangat tinggi, hal ini mengingat Kota Serang memiliki keterbatasan lahan yang tersedia. Pemenuhan lahan tidak hanya untuk kebutuhan perkantoran, fasilitas umum dan perdagangan saja, bahkan yang paling banyak membutuhkan ketersediaan lahan adalah lahan untuk pemukiman penduduk. Fungsi lahan untuk pemukiman penduduk inilah yang menjadi salah satu permasalahan dalam pembangunan tata ruang wilayah karena kualitas sanitasi lingkungannya tidak memadai.

Penanganan sanitasi lingkungan oleh pemerintah sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala. Jumlah fasilitas yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk. Selain itu, masyarakat di banyak wilayah masih mempraktekkan perilaku hidup yang tidak sehat, seperti buang air besar di kebun atau di sungai yang airnya kotor, mencuci di sungai yang airnya kotor, membuang sampah sembarangan dan lain-lain.

Begitu besarnya pengaruh sanitasi lingkungan terhadap kualitas hidup terutama kesehatan masyarakat, maka perlu upaya pengelolaan pemukiman perkotaan yang baik yang menjamin peningkatan kualitas sanitasi lingkungan yang sehat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisa terkait implementasi kebijakan pengelolaan sanitasi dalam pembangunan daerah di Kota Serang.

Tinjauan Pustaka

a. Sanitasi

Sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia (Azwar, 1995). Sanitasi dasar pada umumnya terdiri dari beberapa fasilitas yaitu jamban sehat, air bersih, saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah.

Berdasarkan Buku Indikator TPB (BPS, 2018) menjelaskan bahwa fasilitas sanitasi layak yaitu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain klosetnya menggunakan leher angsa atau plensengan dengan tutup, tempat pembuangan tinjanya menggunakan tangki septic atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Sanitasi layak dan berkelanjutan mempunyai 5 (lima) kriteria yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah rumah tangga dengan aman, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

Dalam agenda SDGs, goals ke 6 mempunyai tujuan menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Adapun targetnya adalah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2030 mencapai akses universal dan merata terhadap air

minum yang aman dan terjangkau bagi semua

2. Pada Tahun 2030 mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat sembarang, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
3. Pada Tahun 2030 meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
4. Pada Tahun 2030 secara bermakna meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin keberlanjutan penggunaan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
5. Pada Tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
6. Pada Tahun 2020 melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

b. Pembangunan Daerah

Ginjar Kartasmita dan Siagian (1994) memberikan penjelasan tentang pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Sedangkan Ginjar Kartasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Beberapa ahli menganjurkan bahwa pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai (Todaro, 2003):

1. Ketahanan (*Sustenance*) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
2. Harga diri (*Self Esteem*) : pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
3. Freedom from servitude : kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, RPJMD Kota Serang 2019-2024 dan data primer dengan melakukan wawancara terhadap stakeholder.

Untuk merangkum data hasil wawancara peran dari pemerintah daerah dijelaskan secara kualitatif dengan mendeskripsikan program pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi. Sementara untuk menentukan kebijakan yang direkomendasikan dilakukan dengan analisis SWOT.

Hasil dan Analisa

Kota Serang merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupaten Serang. Amanat pembentukan Kota Serang bermula sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, yang menetapkan Serang sebagai ibu kota bagi provinsi yang baru dibentuk itu.^[1] Selanjutnya, kota ini resmi berdiri melalui Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten, yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2007.

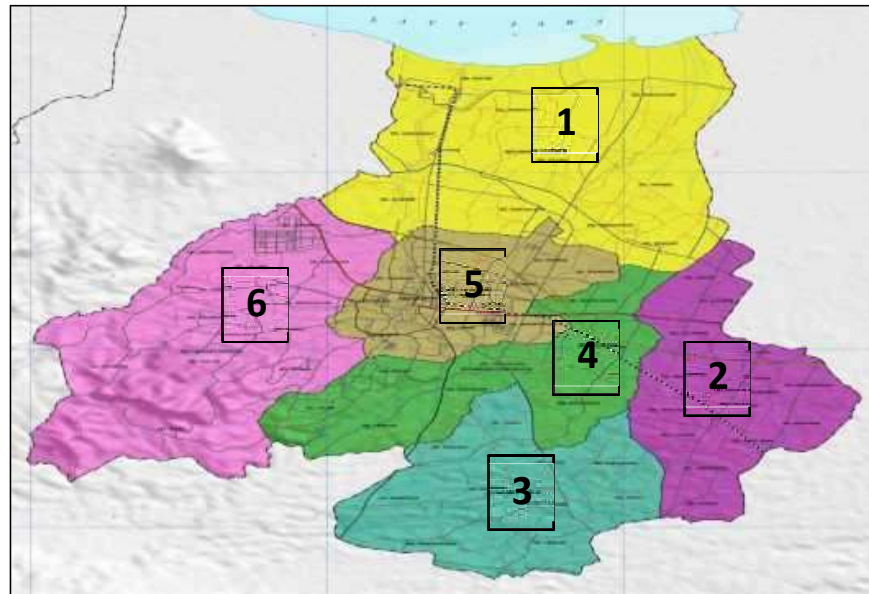
Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten mempunyai luas wilayah 266,77 KM² yang terbagi atas 6 kecamatan dan terdiri dari 67 Kelurahan. Secara geografis Kota Serang terletak antara 50°99' – 60°22' Lintang Selatan dan 106°07' – 106°25' Bujur Timur.

Tabel 1.
Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan
1.	Serang	258,8	12
2.	Kasemen	633,6	10
3.	Taktakan	478,8	13
4.	Cipocok Jaya	315,4	8
5.	Curug	496,0	10
6.	Walantaka	484,8	14
	Kota Serang	2.667,4	67

Sumber : Kota Serang Dalam Angka 2019

Secara administratif Kota Serang memiliki batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara Berbatasan dengan Laut Jawa (Teluk Banten), Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Ciruas (Kab. Serang), Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Baros (Kab. Serang), Sebelah Barat Berbatasan dengan Kramatwatu dan Gunungsari (Kab. Serang).



Gambar 1. Peta Wilayah Kota Serang (1. Kecamatan Kasemen; 2. Kecamatan Curug; 3. Kecamatan Walantaka, 4. Cipocok Jaya, 5. Kecamatan Serang; 6. Kecamatan Taktakan).

Tabel 2.
Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan
1.	Serang	258,8	12
2.	Kasemen	633,6	10
3.	Taktakan	478,8	13
4.	Cipocok Jaya	315,4	8
5.	Curug	496,0	10
6.	Walantaka	484,8	14
	Kota Serang	2.667,4	67

Sumber : Kota Serang Dalam Angka 2019

Tabel 3.
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Tiap Kecamatan Tahun 2018

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1.	Serang	226.717	8.832
2.	Kasemen	95.992	1.528
3.	Taktakan	90.960	1.933
4.	Cipocok Jaya	109.793	3.620
5.	Curug	50.885	1.032
6.	Walantaka	92.253	1.949
	Kota Serang	677.804	2.541

Sumber : Kota Serang Dalam Angka 2019

Berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 2 maka Kecamatan Serang yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi, dengan karakteristik wilayah perkotaan dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa.

Kondisi Demografi Kota Serang ditunjukkan dari jumlah penduduk Kota Serang yang setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS Kota Serang, pada tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah penduduk Kota Serang berjumlah 677.804 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 2.541 jiwa/ km². Jumlah penduduk tersebut mengalami peningkatan sebanyak 11.204 jiwa dari tahun 2017 yang berjumlah 666.600 jiwa atau meningkat sekitar 1.68%.

Kota Serang memiliki keragaman kondisi sosiogeografis, yaitu lingkungan pesisir pantai, lingkungan perkotaan, dan lingkungan agroekosistem (perdesaan). Wilayah Kecamatan Kasemen bagian utara mewakili daerah pesisir pantai, sebagian besar wilayah Kecamatan Curug, Walantaka, Kasemen, Taktakan dan Cipocok Jaya adalah wilayah agroekosistem, adapun Kecamatan Kota Serang dan sebagian kecil Kecamatan Kasemen, Cipocok Jaya merupakan wilayah perkotaan.

Beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kota Serang adalah SWS Cibanten, yang terdiri dari DAS-DAS Cibanten Utara, Tengah, Timur dan Cibanten Barat. Keempat DAS itu terdiri dari sub-sub DAS dan sumber air seperti yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 4.
Daftar DAS/Sub DAS di Wilayah Kota Serang

No.	Nama DAS	Sub DAS	Luas (+ Km ²)
1	DAS Cibanten Utara	Sub Blok Unyur	5.021
		Sub Blok Trondol	7.917
		Sub Blok Panancangan	3.535
		Sub Blok Sumur Pecung	7.082
		Sub Blok Kalibedeng	5.260
2	DAS Cibanten Tengah	Sub Blok Cibanten (outlet Kp. Serut)	76.351
		Sub Blok Cibanten Kota	14.181
		Sub Blok Cibanten (Outlet Desa Kasemen)	219.312
3	DAS Cibanten Timur	Sub Blok Cigeplak	15.166
		Sub Blok Kubang	2.554
		Sub Blok Cilaku	3.435
		Sub Blok Curug Irigasi Ciwatu	15.720
4	DAS Cibanten Barat	Sub Blok Sungai Pelamunan	37.846
		Sub Blok Sungai Cikaduan	5.273
		Sub Blok Sungai Cirengas	7.963
		Sub Blok Sungai Ciwatu	79.125
		Sub Blok Sungai Cikentang	16.736
		Sub Blok Sungai Ciracas	7.071

Sumber : Dinas PU SDA Kota Serang

Sungai yang mengalir melalui wilayah Kota Serang adalah Sungai Cibanten. Masih ada masyarakat yang menggunakan sungai tersebut sebagai sumber air konsumsi (Mandi, Cuci, Kakus), hal ini dikarenakan cukup dalamnya air tanah apabila akan melakukan pembuatan sumur. Permasalahan yang terjadi di sepanjang daerah aliran sungai Cibanten adalah terjadinya banjir bila curah hujan tinggi, dan cukup terjalnya tebing sungai yang dapat

membahayakan masyarakat sekitarnya. Pada saat ini kondisi Sungai Cibanten juga tidak layak digunakan untuk sumber air konsumsi.

Sanitasi yang meliputi pelayanan air limbah, persampahan, drainase, kesehatan dan kebersihan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dan merupakan tanggung jawab kita semua. Namun pertumbuhan kebutuhan akan pelayanan sanitasi seiring dengan perkembangan penduduk saat ini semakin sulit dikejar dan dipenuhi.

Kondisi Umum Sanitasi di Kota Serang

Berdasarkan data dari Nawasis (*National Water Supply and Sanitation Information Services*), Permasalahan sanitasi permukiman di Kota Serang umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain adalah:

1. Masih rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi, utamanya pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri. Hal ini belum termasuk pada keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, kontribusi pendanaan atau pun lahan, dan lain-lain.
2. Masih kurangnya koordinasi antar pihak-pihak yang berkepentingan - baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu kurang padu dan komprehensifnya perencanaan dan program pembangunan juga merupakan permasalahan yang menyebabkan kurang efisien dan efektifnya pembangunan sanitasi permukiman.
3. Masih kurangnya minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi. Alasan yang umum dikemukakan adalah pertimbangan ekonomis dan keuangan, peraturan dan perundangan yang belum mendukung, dan lain-lain.

Nawasis ini adalah lembaga yang merupakan pusat data dan informasi berbasis internet yang sedang dikembangkan untuk memantau perkembangan sektor air minum dan sanitasi di Indonesia. Nawasis tidak hanya mengevaluasi kinerja sektor air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL), namun juga kesatuan sistem yang akan memberikan layanan advokasi dan peningkatan kapasitas, untuk meningkatkan pembangunan air minum dan sanitasi.

Berikut ini kondisi umum sanitasi di Kota Serang dilihat berdasarkan fasilitas sanitasi dasar yaitu :

1. Jamban Sehat

Dinas Kesehatan Kota Serang mencatat ada sebesar 38% masyarakat yang masih buang air besar di kebun. Dari 6 (enam) kecamatan di Kota Serang, yang paling banyak terdapat warga buang air besar di kebun adalah Kecamatan Kasemen. Kebutuhan jamban yang sehat menjadi hal yang sangat penting dalam kesehatan bagi masyarakat. Buang air besar sembarangan dapat menyebabkan pencemaran air (kotoran yang dibuang sembarangan dapat mengandung bakteri e-coli, sedangkan air yang sudah tercemar oleh bakteri e-coli sudah tidak dapat digunakan lagi), menyebabkan kurang gizi (buang air besar dapat menyebabkan lingkungan kotor, lingkungan yang kotor menyebabkan makanan kotor, makanan yang kotor menjadi tidak bergizi), menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, kolera dan disentri, dan menyebabkan kematian (penyakit yang disebabkan oleh BAB sembarangan biasanya menyerang anak-anak, sedangkan daya tahan tubuh anak-anak sangat lemah)

2. Air Bersih

Sistem pelayanan air perpipaan Kota Serang memanfaatkan mata air Citaman (80 l/dt) dan Sukacai (60 l/dt) sebagai air baku, yang dialirkan secara gravitasi ke wilayah pelayanan setelah melalui unit aerasi untuk menghilangkan CO₂ agresifnya. Kelurahan-kelurahan di wilayah Kota Serang yang telah dilayani sistem distribusi air perpipaan adalah

Kelurahan Serang, Cipare, Cimuncang, Lopang, Kota Baru, Kagungan, Lontar, Kaligandu, Sumur Pecung, Cipocok Jaya, Panancangan, Unyur, dan Taman Baru. Di samping melalui pelayanan PDAM, sebagian penduduk memenuhi kebutuhan air bersih dan minumannya dari sumur dangkal yang kualitasnya cukup baik dan selalu tersedia sepanjang tahun. Sumber air individual tersebut hampir merata di seluruh wilayah kota terutama di Kelurahan Lopang, Sumur Pecung, dan Cimuncang.

3. Saluran Pembuangan Air Limbah

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Serang, sebagian masyarakat Kota Serang sampai saat ini masih banyak yang membuang limbah cair ke saluran terbuka termasuk sampah-sampah lainnya. Hal inilah yang harus dirubah, sebisanya sampah dibuang ke tempat yang seharusnya.

4. Tempat Pembuangan Sampah.

Keberhasilan pengelolaan persampahan di suatu kota tidak terlepas dari beberapa aspek yang terkait. Peranan masing-masing aspek tersebut sangat menentukan berhasil atau tidaknya penanganan pengelolaan persampahan. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah aspek hukum, aspek institusional, aspek teknis dan teknologi, serta aspek peran serta masyarakat.

Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat telah meningkatkan jumlah timbulan sampah, jenis, dan keberagaman karakteristik sampah. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap berbagai jenis bahan pokok dan hasil teknologi serta meningkatnya usaha atau kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga memberikan kontribusi yang besar terhadap kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Meningkatnya volume timbulan sampah memerlukan pengelolaan. Pengelolaan sampah yang tidak mempergunakan metode dan teknik pengelolaan sampah yang ramah lingkungan selain akan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan juga akan sangat mengganggu kelestarian fungsi lingkungan baik lingkungan pemukiman,

hutan, persawahan, sungai dan lautan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1) sampah organik yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.

Untuk mewujudkan kota bersih dan hijau, pemerintah telah mencanangkan berbagai program yang pada dasarnya bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat urban dapat disaksikan dari Kota Serang, yaitu pada sejak Tahun 2007 awal tahun terbentuknya Kota Serang. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi suatu permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lingkungan bersih dan sehat.

Penanganan sampah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang adalah pengumpulan sampah dari sumber-sumbernya, seperti dari masyarakat (rumah tangga) dan tempat-tempat umum yang dikumpulkan di TPS yang telah disediakan. Selanjutnya diangkut dengan truk yang telah dilengkapi jaring ke TPAS. Bagi daerah-daerah yang belum mendapat pelayanan pengangkutan mengingat sarana dan prasara yang terbatas

telah dilakukan pengelolaan sampah secara swakelola dengan beberapa jenis bantuan fasilitas pengangkutan. Bagi usaha atau kegiatan yang menghasilkan sampah lebih dari 1 m³/hari diangkut sendiri oleh pengusaha atau bekerjasama dengan pihak lainnya seperti desa/kelurahan atau pihak swasta. Penanganan sampah dari sumber-sumber sampah dengan cara tersebut cukup efektif.

Beberapa usaha yang telah berlangsung di TPAS untuk mengurangi volume sampah, seperti telah dilakukan pemilahan oleh pemulung untuk sampah yang dapat didaur ulang. Ini ternyata sebagai matapencarian untuk mendapatkan penghasilan. Terhadap sampah yang mudah busuk telah dilakukan usaha pengomposan. Namun usaha tersebut masih menyisakan sampah yang harus dikelola yang memerlukan biaya yang tinggi. Penanganan sisa sampah di TPAS sampai saat ini masih dengan cara open dumping yaitu pembusukan secara alami. Hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi lingkungan, yaitu pencemaran tanah, air, dan udara.

Strategi Kebijakan

Untuk menentukan strategi kebijakan yang perlu dilakukan dalam memecahkan masalah sanitasi di wilayah Kota Serang dilakukan melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Oppurtinities, Treats*). Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara kepada stakeholder terkait permasalahan kondisi sanitasi di wilayah perkotaan Kota Serang adalah sebagai berikut.

Kelemahan (*Weakness*) :

1. Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Serang masih rendah
2. Kurangnya penyediaan sarpras sanitasi yang memadai
3. Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan dan dalam menggerakkan peran masyarakat

Ancaman (*Threats*)

1. Peningkatan jumlah penduduk baik dari kelahiran maupun migrasi dari daerah lain
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan
3. Adanya penyakit berbahaya yang disebabkan karena sanitasi buruk

Kekuatan (Strengths)

1. Lahan yang belum terbangun masih cukup untuk ruang terbuka hijau dan daerah resapan air
2. Kondisi Topografi sangat memungkinkan untuk pengembangan sarana drainase yang baik
3. Kedudukan Kota Serang yang merupakan ibukota Provinsi Banten

Peluang (Opportunities)

1. Adanya Program Nasional dalam Pengelolaan Sanitasi yaitu STBM (meskipun belum optimal)
2. Tempat Pembuangan Akhir yang ada masih berpotensi untuk dikembangkan
3. Adanya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Tabel Analisis SWOT Lingkungan Eksternal Pengelolaan Sanitasi Wilayah Agroekosistem di Kota Serang.

Tabel 5.
Analisis Lingkungan Eksteral

Peluang	Bobot	Urgensi	B X U
Adanya Program Nasional dalam Pengelolaan Sanitasi yaitu STBM (meskipun belum optimal)	0,10	1	0,10
Tempat Pembuangan Akhir yang ada masih berpotensi untuk dikembangkan	0,10	2	0,20
Adanya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan	0,20	3	0,60
Jumlah Sub Peluang	0,40		0,90
Ancaman	Bobot	Urgensi	B x U
Peningkatan jumlah penduduk baik dari kelahiran maupun migrasi dari daerah lain	0,20	1	0,20
Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan	0,15	2	0,30
Adanya penyakit berbahaya yang disebabkan karena sanitasi buruk	0,25	3	0,75
Jumlah Sub Ancaman	0,60		1,25
Jumlah Total Eksternal	1		2,15

Tabel 6.
Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan	Bobot	Urgensi	B x U
Lahan yang belum terbangun masih cukup untuk ruang terbuka hijau dan daerah resapan air	0,20	3	0,60
Kondisi Topografi sangat memungkinkan untuk pengembangan sarana drainase yang baik	0,15	2	0,30
Kedudukan Kota Serang yang merupakan ibukota Provinsi Banten	0,25	1	0,25
Jumlah Sub Kekuatan	0,60		1,15
Kelemahan	Bobot	Urgensi	B x U
Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Serang masih rendah	0,10	2	0,20
Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan dan dalam menggerakkan peran masyarakat	0,10	3	0,30
Kurangnya penyediaan sarpras sanitasi yang memadai	0,20	1	0,20
Jumlah Sub Kekuatan	0,40		0,70
Jumlah Total Internal	1		1,85

Tabel 7.
Matriks Penentuan Strategi

INTERNAL	Kekuatan (S) (1,15)	Kelemahan (W) (0,70)
EKSTERNAL		
Peluang (O) (0,90)	Strategi O-S $0,90 + 1,15 = 2,05$	Strategi OW $0,90 + 0,70 = 1,60$
Ancaman (T) (1,25)	Strategi T-S $1,25 + 1,15 = 2,40$	Strategi T-W $1,25 + 0,70 = 1,95$

Tabel 8.
Formulasi strategi SWOT

INTERNAL EKSTERNAL	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahan yang belum terbangun masih cukup untuk ruang terbuka hijau dan daerah resapan air 2. Kondisi Topografi sangat memungkinkan untuk pengembangan sarana drainase yang baik 3. Kedudukan Kota Serang yang merupakan ibukota Provinsi Banten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Serang masih rendah 2. Kurangnya tenaga sanitarian dan kader kesehatan, sehingga berdampak pada kurangnya sosialisasi kesehatan lingkungan 3. Kurangnya penyediaan sarpras sanitasi yang memadai
	KUADRAN II STRATEGI O-S	KUADRAN I STRATEGI O-W
1.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong program pemerintah untuk mengoptimalkan implementasi prgram STBM 2. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan penyediaan sarpras sanitasi yang berkualitas (seperti : TPA go green, drainase yang berkualitas, dan ruang terbuka hijau yang representative) 3. Mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pemerintah untuk meningkatkan SDM Kesehatan 2. Peningkatan pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkualitas 3. Mendorong Pemerintah untuk bekerja sama dengan pihak swasta (CSR) untuk membangun sanitasi Kota Serang bersama-sama

	implementasi Perda 10/2010 sebagai perwujudan ibukota provinsi yang madani	
ANCAMAN :		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah penduduk baik dari kelahiran maupun migrasi dari daerah lain 2. Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan kesehatan lingkungan 3. Adanya penyakit berbahaya yang disebabkan karena sanitasi buruk 	<p style="text-align: center;">KUADRAN IV STRATEGI T-S</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang berkualitas bagi masyarakat 2. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan program sosialisasi kebersihan dan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan yang langsung berdampak 3. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat 	<p style="text-align: center;">KUADRAN III STRATEGI T-W</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong program pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan 2. Mendorong pemerintah dalam menjalin kerjasama dengan swasta (CSR) untuk meningkatkan pengelolaan sanitasi 3. Meningkatkan kualitas pembangunan sarana dan prasarana sanitasi bagi masyarakat.

Berdasarkan formulasi strategi matriks SWOT di atas, maka alternatif strategi yang sesuai dengan keadaan usaha yakni strategi T-S diantaranya strategi:

1. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi yang berkualitas bagi masyarakat
2. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan program sosialisasi kebersihan dan kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan yang

langsung berdampak

3. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan sanitasi yang terintegrasi dan komprehensif menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah di Kota Serang. Strategi kebijakan yang tepat dalam pengelolaan sanitasi di Kota Serang adalah dengan mengoptimalkan potensi dan peluang yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan eksternal yang ada, yaitu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sanitasi, meningkatkan sosialisasi kebersihan dan kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Referensi

- Azwar, S. (1995). "Sikap Manusia : Teori dan Pengukurannya, Edisi 2. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- United Cities and Local Government (2015). "Buku Tujuan Pembangunan Berkelanjutan", Jakarta.
- Kartasmita, Gianjar dan Siagian (1994). pembangunan infrastruktur seminar pembangunan Konsep dan implikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
- Kartasmita Gianjar (1996). "Pembangunan Untuk Rakyat", Jakarta.
- Mungkasa, O (2004). "Sekilas Kondisi Air Minum dan Sanitasi di Indonesia", Media Percik, Jakarta.
- Toddaro, M. P & Stephen Smith (2003). Economics Development, 8th, Addison Wesley, USA.
Institutions, Growth, and Quality of Life" World Development Report
Oxford University Press, New York.